

PROSES INTEGRASI DAN TERLEPASNYA TIMOR-TIMUR TERHADAP INDONESIA

Agus Rustamana.M.Pd., M. Si¹, Anggi Ghefira S², Divino Narendra³
Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Raya Ciwaru No.25 Serang, Banten

Correspondence

Email: agus.rustamana@untirta.ac.id

No. Telp:

Submitted: 3 December 2023

Accepted: 12 December 2023

Published: 14 December 2023

ABSTRAK

Sejarah Timor Timur adalah sebuah sejarah konflik di sebuah wilayah. Timor Timur merupakan negara yang baru berdiri setelah berhasil melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, melalui jejak pendapat 30 Agustus 1999 yang lalu. Jejak pendapat ini dilakukan karena banyak nya konflik yang terjadi di Timor Timur, Pelanggaran HAM terus menerus terjadi . Hal ini dikarenakan Jauh sebelum negara Timor-Leste ini terbentuk sudah banyak konflik dan pertentangan yang terjadi di wilayah Timor Timur ini. Sejarah panjang tentang pertentangan yang terjadi di Timor Timur ini akan dibahas oleh penulis dalam Jurnal ini. Sejarah pertentangan yang terjadi di Timor Timur ini seakan akan tidak akan pernah selesai. Pertentangan yang paling mencolok antara lain adalah pertikaian yang terjadi antara pihak partai politik Fretilin di Timor Timur yang memperjuangkan kemerdekaannya dengan Pemerintah Indonesia yang beranggapan bahwa Partai Fretilin adalah Partai Radikal yang sesegera mungkin harus dipadamkan dengan gerakan pasukan Militer RI, Namun hal ini menimbulkan banyak pelanggaran HAM terhadap masyarakat Timor Timur. Permasalahan ini langsung ditindaklanjuti Ketika Indonesia mengalami pergantian Presiden dari presiden Soeharto dan B.J. Habibie. Dengan ketegasan Presiden B.J. Habibie yang tidak terlalu menahan Timor-Leste untuk memisahkan diri akhirnya dibuat lah Jejak pendapat untuk masyarakat Timor Leste. Jejak pendapat tersebut terdapat 2 opsi yaitu Otonomi khusus namun tetap menjadi wilayah bagian Indonesia atau mandiri memilih memisahkan diri dari Indonesia. Hasil yang didapatkan adalah pada akhirnya musyawarah jejak pendapat tersebut dimenangkan oleh pihak pidato yang memilih mandiri dan memisahkan diri dari Indonesia.

Kata Kunci : Konflik, Pertikaian, Pelanggaran HAM, Partai, Radikal

ABSTRACT

The history of East Timor is a history of conflict in a region. East Timor is a newly established country after successfully breaking away from the Unitary State of the Republic of Indonesia, through a poll on August 30 1999. This opinion poll was carried out because there were many conflicts occurring in East Timor, human rights violations continued to occur. This is because long before the country of Timor-Leste was formed, there were many conflicts and contradictions that occurred in the East Timor region. The long history of the conflict that occurred in East Timor will be discussed by the author in this journal. It is as if the history of the conflict that occurred in East Timor will never end. The most striking conflict, among others, was the conflict that occurred between the Fretilin political party in East Timor which was fighting for its independence and the Indonesian government which thought that the Fretilin Party was a radical party which had to be suppressed as soon as possible with the movement of Indonesian military troops. However, this gave rise to many violations. human rights towards the people of East Timor. This problem was immediately followed up when Indonesia experienced a change of President from President Suharto and B.J. Habibie. With the firmness of President B.J. Habibie, who was not too resistant to Timor-Leste's secession, finally created a poll for the people of Timor-Leste. In this opinion poll, there are 2 options, namely special autonomy but remaining a part of Indonesia or independently choosing to separate from

Indonesia. The result obtained was that in the end the opinion deliberation was won by the parties who chose to be independent and separate from Indonesia.

Keywords: Conflict, Disputes, Human Rights Violations, Party, Radical

Pendahuluan

Dengan keadaan sumber daya alam yang melimpah ini menarik perhatian orang-orang Barat untuk menjadikan wilayah Timor Timur sebagai daerah tujuan jajahan dan persinggahan orang-orang Barat setelah berdagang di Maluku. Tidak lain tujuan persinggahan orang-orang Barat itu adalah untuk mencari rempah-rempah, didukung dengan kekayaannya sumber daya alam di wilayah Timor Timur. Oleh karena itu Belanda dan Portugal (Portugis) menjadikan Timor Timur sebagai daerah jajahannya.

Jauh sebelum Timor Timur bergabung (intergrasi) ke Indonesia, Timor Timur ini merupakan daerah jajahan Portugis. Selama kurang lebih empat abad menjadikan Timor Timur sebagai daerah jajahan Portugis. Akan tetapi kekuasaan Portugal ini runtuh dan hancur karena adanya Revolusi Bunga yang terjadi di Portugal. Akhir dari Revolusi ini ketika berada pada puncaknya yaitu pada tanggal 25 April 1974. Revolusi Bunga ini dielopori perwira muda yang bergabung dengan partai MFA (Movimento das Dorcadion Armadas) atau lebih dikenal dengan Gerakan Bersenjata. Revolusi Bunga ini dilakukan untuk menentang Rezim Ceatano-Salazar. Akibat dari Revolusi Bunga ini merubah seluruh keadaan kekuasaan Portugal secara drastis. Akhirnya Rezim Portugal berganti, Kebijakan politik Dekoloni akhirnya mulai di terapkan. Naun Kebijakan Dekolonisasi ini tidak berjalan lancar karena tidak memiliki kesatuan konsep. Keadaan politik Portugal mulai tidak beraturan kekuasaan kosong. Akibatnya janji-janji dan hal-hal sipil dikembalikan dan menjadi politik Demokrasi, serta keadaan bebas untuk mendirikan partai dapat dijalankan.

Partai pertama adalah UDT (Uniao Democratica Timorence) yang diresmikan tanggal 11 Mei 1974. Ketua nya adalah Franciscus Lopez da Cruz. Partai UDT ini bertujuan untuk mencapai kemerdekaan Timor Timur dengan cara bertahap. Partai kedua adalah ASDT (Associacao Social Democratica Timorence) atau dapat diterjemahkan yaitu (Perkumpulan sosial Demokratik Timor) berdiri pada tanggal 20 Mei 1974. Namun terjadi beberapa pergolakan dan perbedaan pemahaman dalam. Partai ASDT ini. Dengan begitu Partai ASDT ini akhirnya dirubah menjadi Partai FRETILIN atau (Frente Revolucianoria de Timor-Leste Independent) yang diterjemahkan yaitu (Front Revolusioner untuk Kemerdekaan Timor). Partai ini Diketuai oleh Francisco Xavier de Amaral. Sifat partai Fretilin yang Radikal ini menginginkan Cepat kemerdekaan Untuk Timor Timur. Partai yang Ketiga yaitu APODETI (Associacao Popular Democratica de Timor) atau jika diterjemahkan adalah Perhimpunan Demokrasi Rakyat Timor. Partai ini berdiri 17 Mei 1974. Namun sebelum nya Partai ini bernama AITI (Associacao para Integracao de Timor na Indonesia) yang diterjemahkan berarti Perhimpunan untuk Integrasi Timor di Indonesia. Namun berubah nama menjadi yang lebih dikenal dengan Partai APODETI. Partai ini dipimpin oleh Arnaldo dos Reis Araujo. Partai APODETI ini dengan tegas berkeinginan untuk bergabung (berintegrasikan) ke Indonesia sejak awal berdirinya.

Terdapat dua partai lainnya, selain ketiga partai tersebut. Terdapat Partai yang bernama TRABALHISTA yang berdiri pada Oktober 1974. Partai ini didominasi oleh kaum Buruh dengan ketuanya adalah A. Abrao dan Donungos Pereira. Partai TRABALHISTA ini mempunyai tujuan untuk memerdekakan Timor. Lalu menjadikannya sebagai anggota Common Wealth. Selanjutnya ada Partai KOTA. (Klibur Oan Timor Aswain) diketuai Jose Martins berdiri pada November 1974.

Pada awalnya Kota bertujuan menempatkan para liburan berada di lapisan pimpinan rakyat Timor, namun karena pemilihan dilaksanakan dengan musyawarah tujuan ini mengalami pergeseran. Akan tetapi Kedua partai ini yaitu TRABALHISTA dan Kota Tidak terlalu berpengaruh di Wilayah Timor Timur. Yang memberikan pengaruh besar adalah peran dari ketiga Partai pertama tadi yaitu, Partai UDT, FRETILIN, dan APODETI.

Partai partai yang terdapat di Timor Timur ini mempunyai tujuan dan keinginan yang berbeda-beda untuk memperjuangkan kemerdekaan Timor Timur, Dalam menjalankan Program nya sesuai dengan Keinginan dan Pandangan masing masing dari partai. Sejak berdiri partai partai ini masing-masing partai berlomba-lomba untuk menunjukkan eksistensi mereka , bersaing mendapatkan massa yang paling terbanyak.

Hambatan Pengintegrasian Timor Timur terhadap Indonesia tidak hanya soal Terjadinya Pergolakan di Timor Timur saja, tetapi juga karena adanya campur tangan negara lain seperti Amerika Serikat dan Australia. Ini dikarenakan waktunya bertepatan dengan Perang Dingin yang terjadi di wilayah Internasional antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Persaingan kedua negara tersebut sangat berpengaruh dan berdampak nyata dalam beberapa bidang. Seperti ; perlombaan ideologi, senjata, diplomatik, (spy war) Perang Spionase, ekonomi dan militer. Dan akhirnya Perang Dingin ini juga berdampak ke Timor Timur. Yaitu adanya pihak yang campur tangan Amerika Serikat dan Australia yang ikut serta berurusan terkait pengintegrasian Timor Timur ke Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI.

Dukungan dari Amerika Serikat terhadap Indonesia adalah dengan mengedepankan ideologis Liberal yang sangat anti dengan Komunis. Amerika Serikat mempunyai pandangan kekhawatiran jika Timor Timur merdeka maka akan menjadi negara yang berideologi Komunisme. Sedangkan dukungan Australia hanya desakan dari Amerika dalam bidang ekonomi. Indonesia juga saat itu sangat menentang Komunisme sekaligus sedang menerapkan membangun yang membutuhkan tingkat keamanan yang lebih. Sehingga Presiden kedua Republik Indonesia yaitu Presiden Soeharto ikut khawatir Timor Timur akan menjadi negara Komunis jika dikuasai oleh Partai Fretilin. Dengan begitu Presiden Soeharto memberikan ketegasan bahwa tidak berambisi untuk meluaskan daerah teritorial dengan berintegrasi nya Timor Timur terhadap Indonesia, dan masih mendukung sepenuhnya Kebijakan Politik Dekolonisasi. Presiden Soeharto kembali menegaskan bahwa jika Timor Timur menginginkan berintegrasi ke Indonesia, maka bukan bergabung sebagai sebuah negara, tetapi sebagai wilayah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kebijakan Politik Dekolonisasi dari pemerintahan Portugal dilaksanakan sejak Kolonel Lemos Pires menjadi Gubernur Timor Portugis 25 November 1974. Didampingi dengan 2 mayornya yaitu Francisco Kota dan Costa Jin atas yang menjabat sebagai Penanggungjawab media masa dan juga pada Bidang Politik. Salah satu kebijakan Lemos Pires yaitu memukul mundur pasukan militer Portugal sebanyak 3.000 tentara. Dan yang tersisa di Timor Timur hanya ada 200 tentara. Namun, usaha tersebut tidak berpengaruh lama karena Portugal kembali Mengirimkan 1.000pasukan tentara ke Timor. Dengan membawa beberapa senjata canggih terbaru dari NATO. Namun Mayor Mota sebagai Penanggungjawab Bidang Politik malah ingin menciptakan wilayah Timor menjadi Negara Komunis. Untuk mewujudkannya maka Mayor Mota menghalalkan segala cara salah satunya adalah mengusulkan agar dibentuk koalisi dia partai besar yaitu UDT dan Fretilin. Maka terbentuk lah koalisi tersebut pada 20 Januari 1975.

Namun Kebijakan Dekolonisasi ini runtuh dan tidak berjalan lancar. Dan juga akibat atau dampak kegagalan kebijakan Dekolonisasi ini menciptakan atau menimbulkan pemberontakan dan

pergolakan di wilayah Timor Timur. Pergolakan ini mencapai titik puncak yaitu Perang Saudara pada Agustus 1975. Portugal yang tidak bertanggungjawab meninggalkan Timor Timur, karena ketidakmampuan Portugal untuk mengurus dan menyelesaikan masalah pergolakan yang terjadi di Timor Timur. Dengan keadaan ini maka pemerintahan wilayah Timor Timur menjadi pemerintahan atau kekuasaan kosong. Akibat dari pergolakan yang terjadi di Timor Timur membuat Indonesia ikut serta turun tangan untuk membantu menyelesaikan pergolakan yang terjadi di Timor Timur ini. Upaya Indonesia untuk meredam pergolakan di wilayah Timor Timur ini dengan memerintahkan untuk mengirim Pasukan ABRI sebagai upaya untuk mengontrol dan menstabilkan di daerah perbatasan yang berdampak akibat perang saudara Timor Timur. Lalu pemerintahan Indonesia melancarkan sebuah Operasi Militer yaitu Operasi Komodo Januari pada tahun 1975.

Operasi Komodo (Operasi Militer Indonesia) diperintahkan untuk mengawasi perkembangan daerah Timor Timur tanpa genjatan senjata (non operasi militer). Operasi Militer Komodo diketuai oleh KPL.BAKIN Letnan Jendral Yoga suoegomo. Perintah Tugas yang pertama kali dibebankan pada pasukan Operasi Komodo adalah bisa menghadapi dinamika perubahan respon masyarakat Timo Timur dan berusaha untuk berinteraksi dengan masyarakat yang berkeinginan bergabung (berintegritasi) terhadap Indonesia. Tugas pertama Pasukan Operasi Komodo ini membuahkan hasil, perkembangannya partai dan masyarakat yang berkeinginan berintegrasi ke Indonesia memohon bantuan pemerintahan Indonesia untuk menghadapi Partai Radikal Fretilin. Lagi lagi Pemerintahan Indonesia mengerahkan pasukan Militer untuk memperjuangkan masyarakat dan partai yang ingin berintegrasi dengan Indonesia, perintah ini ditugaskan pada Pasukan ABRI dengan nama Operasi yaitu Operasi SEROJA. Operasi Seroja ini di dukung dengan Pasukan ABRI dari Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara Indonesia. Seluruhnya berpartisipasi dan memiliki peran penting untuk membantu Masyarakat, elemen, dan partai Timor Timur yang Pro terhadap Integrasi kepada Indonesia untuk melawan dan menghadapi Partai Fretilin (partai Radikal).

Masih banyak yang belum tahu mengapa Operasi militer ini dinamakan Operasi Bunga Seroja (Operasi Seroja). Namun jika dilihat dari filosofinya, kemungkinan Operasi ini dinamakan Operasi Seroja untuk mengabadikan upaya pengintegrasian Masyarakat Timor Timur terhadap Indonesia yang ditargetkan sebelum Bulan kemerdekaan Indonesia yang jatuh pada Bulan Agustus berarti targetnya yaitu Bulan Juli. Bertepatan dengan Mekar atau tumbuhnya Bunga Seroja biasanya terjadi pada Bulan menjelang Juli hingga Agustus. Dengan demikian operasi militer ini diberi sandi dengan Operasi Seroja.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan pada artikel penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif yakni metode penelitian yang dilakukan dengan menguraikan permasalahan secara deskriptif serta merinci berdasarkan fakta yang objektif. Pengumpulan data pada artikel ini dilakukan menggunakan studi pustaka yaitu teknik pengumpulan data dengan cara menelaah buku, pencarian literatur, catatan, dan laporan yang berhubungan dengan penelitian.

Dalam metode penelitian dilakukan pengumpulan informasi dari berbagai literatur yang berkaitan mengenai proses integrasi hingga terlepasnya Timor-Timur dari Indonesia, bahan pustaka atau literatur selanjutnya di analisis dan di kritik guna menghasilkan sumber atau data informasi yang sesuai fakta dan relevan bagi penelitian, lalu bahan literatur tersebut dijadikan sebagai alat analisis

penelitian guna memperkaya perspektif atau pandangan sehingga hasil dari penelitian ini dapat lebih objektif dan juga ilmiah.

Pembahasan mengenai proses integrasi hingga terlepasnya Timor-Timur dari Indonesia tentunya dapat dilakukan atau diteliti menggunakan metode kualitatif deskriptif karena peneliti dapat memperoleh banyak informasi di dalamnya serta dapat melakukan tinjauan kritis guna menguji keabsahan informasi yang nantinya akan dijadikan peneliti sebagai landasan informasi dalam mendeskripsikan peristiwa yang terjadi. Metode penelitian ini juga memungkinkan peneliti untuk menggambarkan terjadinya peristiwa secara mendetail dan komprehensif.

Pembahasan

1. Latar Belakang

Negara atau kepulauan Timor Timur ini terletak di Timur pulau Timor. Wilayah Timur Timor memiliki Luas sebesar 18.899 km. Timur Timor Letaknya menuju mulai dari Barat Daya hingga ke Timur laut yang sangat luas termasuk posisi wilayah Timor secara keseluruhan. Timor Timur terletak pada 8°71' - 10°22' LS & 123°19' BT. Wilayah utara Timor - Timor berbatasan langsung dengan Selat Wetan (wilayah maluku) yang berhadapan langsung dengan Laut Banda. Wilayah Selatan dan Tenggara Timor Timur yaitu Laut Timor, selain itu Timor Timur juga memiliki beberapa pulau kecil, yaitu Pulau Atauro 140km dan Pulau Yako 11km

Timor Timur kaya akan sumber daya alamnya, terutama pada bidang pertanian. Terdapat beberapa hasil pertanian yaitu Kopi, kopra, jagung, kacang hijau, padi. Dan Kekayaan alam yang paling unggul adalah kayu cendana. Tak hanya sumber daya alam dalam bidang pertanian saja tetapi Timor Timur juga memiliki potensi alam pada bidang pertambangan, yaitu minyak tanggal dan gas bumi. Sumber daya alam pertambangan ini dapat di temukan di daerah Suai, Uatolari, Manatuto, Uatocarbau, dan Voi Lubo.

Dengan keadaan sumber daya alam yang melimpah ini menarik perhatian orang orang Barat untuk menjadikan wilayah Timor Timur sebagai daerah tujuan jajahan dan persinggahan orang orang Barat setelah berdagang di Maluku. Tidak lain tujuan persinggahan orang orang Barat itu adalah untuk mencari rempah - rempah, didukung dengan kekayaannya sumber daya alam di wilayah Timor Timur. Oleh karena itu Belanda dan Portugal (Portugis) menjadikan Timor Timur sebagai daerah jajahannya.

Pada tahun 1960, resolusi PBB mempengaruhi pemerintah Portugis. mengubah status wilayah jajahannya menjadi provinsi seberang laut. Kebijakan yang diambil adalah strategi politik kolonial itu pada dasarnya tujuannya adalah untuk menciptakan dan membentuk kelompok elit yang tetap setia kepada penjajah. Hal itu dilakukan dengan mendorong masyarakat jajahan untuk selalu membaaur dengan struktur dan ketertiban sosial. masyarakat kolonial. Tapi prinsip kolonialis memang demikian promosi sikap anti-kolonial di masyarakat. Sejak Hal ini menimbulkan keinginan untuk menghindari penjajahan Portugis, termasuk Timor Timur. Selain itu, pemerintah Portugis tidak menanggapi seruan tersebut, permintaan, kebutuhan dan kepentingan warga koloni (Michele Turner, 1992: 39-40).

Situasi ini menimbulkan banyak pertentangan di daerah jajahan, sampai Portugis mengambil alih perang kolonial. Situasinya semakin buruk Situasi buruk ini membuat para perwira muda memahami kenyataan yang ada betapa parahnya perang kolonial. Hal ini menimbulkan kemarahan terhadap rezim Salazar dan merencanakan kudeta. Mereka mendirikan Gerakan sebagai wadah bisnis Pada tanggal 25 April 1974, kudeta militer yang sukses terjadi dikenal dengan revolusi bunga. Revolusi Bunga Anyelir di Lisbon, Portugal Angkatan bersenjata Portugis

dikomandoi dan dieksekusi di bawah komando seorang mayor Antonio Espinola, dengan nama gerakan "Movimento Forças Armadas (MFA)", menyebabkan jatuhnya rezim Salazar-Caetano. Salazar adalah salah satunya pemimpin Portugis yang berkuasa sejak tahun 1920-an, dan Marcello Caetano adalah perdana menteri yang menggantikan Salazar dari tahun 1960an. Untuk mengganti kebijakan pada pemerintahan Portugis pasca Revolusi Bunga Anyelir yaitu dengan menunjuk Spinola sebagai presiden Portugal. Spinola diangkat sebagai presiden Gerakan Forças Armadas (MFA) dengan dua program politik yaitu gagasan tentang demokratisasi dan dekolonisasi (Neonbasu, 1997: 40).

Langkah selanjutnya adalah mendorong kebijakan-kebijakan yang saling bersaing koloni antara Presiden Spinola dan mantan perwira MFA yang dulu melantiknya Ada dua versi kebijakan dekolonisasi wilayah Negara jajahan Portugis yaitu versi Spinola dan versi Movimento.

a) Kebijakan dekolonisasi versi Spinola

Gagasan dekolonisasi Spinola pada dasarnya adalah sebuah eksperimen Pembentukan konfederasi Portugal dan Amerika koloni, masing-masing dengan otonomi internal penuh. Siapa Anggota federal memiliki kekuasaan penuh untuk mengatur negara bagian usia Pada saat yang sama, wilayah tersebut tetap berada di bawah kendali pemerintah Lisbon pertahanan dan hubungan luar negeri. Koloni Portugis status provinsi diubah menjadi negara otonom penuh. Kemudian dengan asumsi mayoritas penduduknya berdomisili di permukiman lebih memilih aliansi dengan Portugal dalam bentuk aliansi, kemudian dengan Spinola mengusulkan untuk mengadakan referendum untuk memberikan kesempatan Rakyat menentukan masa depan negaranya. Itu jelas Kebijakan dekolonisasi Spinola pada dasarnya memang seperti itu hanya upaya untuk mengakhiri perang kolonial yang sangat sulit Portugal (Neonbasu, 1997:42).

b) Politik dekolonisasi versi Gerakan

Movimento juga berperan sebagai penyelenggara kudeta dan algojo konsep kebijakan dekolonisasi. Terlepas dari latar belakang konseptual politik Movimento sama dengan konsep Spinola, namun konsep Movimento lebih radikal. Movimento menginginkan dekolonisasi terjadi secara sistematis jadi bukan melalui gagasan federasi seperti konsep Spinola. Namun mereka setuju untuk mengadakan referendum yang memungkinkan orang dapat mengungkapkan keinginannya dan memutuskan masa depan mereka ke negara mereka. Movimento bertujuan untuk menciptakan suasana politik koloni menjadi mandiri dengan membentuk unit unit kekuasaan politik itu sendiri (Neonbasu, 1997: 42).

Perubahan politik di Portugal membuka babak politik di negara-negara kolonial, menawarkan lebih banyak peluang bagi para pejuang kemerdekaan, untuk melaksanakan proses dekolonisasi yang dijanjikan meja spinola. Prisma (1995: 18) menjelaskan hal ini untuk Timor Timur janji-janji tersebut adalah pemulihan hak-hak demokrasi dan pembebasan tahanan politik dan membubarkan Partai Aksi Nasional atau partai yang berkuasa Populer Nasional (ANP), penghapusan polisi rahasia, penghapusan sensor pers dan kebebasan masyarakat untuk mendirikan partai politik dan bertindak berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan pemerintah. Selain itu, pemerintah Portugis juga memberikan tiga pilihan kepada masyarakat Timor Timur untuk mengambil keputusan takdirnya sendiri Tiga opsi tersebut adalah: Pertama, Asosiasi Timor Timur dengan bahasa Portugis; kedua, Timor Timur merdeka; dan pilihan ketiga, integrasi Timor dengan tetangganya di sebelah timur yaitu Indonesia.

2. Sistem partai politik Timor Timur

Dalam kasus Timor Timur, dekolonisasi dilakukan oleh Portugis. Kesempatan untuk membentuk partai politik. Ini akan menjadi tempat di mana suara masyarakat bisa didengar. Ada lima partai politik di Timor. Timur yaitu UDT (Uniao Demokratik Timor-Leste), Fretilin (Frente Revolutionär des unabhängigen Osttimors), APODETE (Associação Popular Democrática Timorese), KOTA (Klibur Oan Timor Aswa'in), Trabalhista (E.M. Tomodok, 1994: 87)

a. Partai UDT (Uniao Democratica Timorence)

Partai pertama adalah UDT (Uniao Democratica Timorence) yang diresmikan tanggal 11 Mei 1974. Partai ini berada dibawah kepemimpinan Ir. mari Viegas Carascalao (mantan wakil ketua ANP Timor Timur). Adapun pendiri yang lainnya yaitu Francisco Lopez da Cruz, Joao Carascalao, Domingus de Oliveira, dan Caesar Augusto da Costa Mousinho.

Adapun tujuan dari partai ini adalah berkeinginan berintegrasi pada Portugal, tetapi setelah itu Portugal harus melepaskannya dirinya dari Timor-Timur. Dengan begitu Timor-Timur akan menjadi negara yang berdiri sendiri. Capaian khusus partai UDT adalah dengan membentuk negara yang Federasi di bawah naungan perlindungan keamanan dari Portugal (gagasan jendral Spinoza). Partai ini lebih Pro kepada Portugal, memiliki rasa semangat dan berjiwa Portugal. Begitu besar rasa patriotisme kepada Portugal Partai ini memiliki semboyan yaitu "Timbul Tenggelam Bersama Portugal"

b. Partai Fretilin (Frente Revolucionaria de Timor Leste Independente)

Partai ini sebelumnya dikenal sebagai "Associação Social Democrata de Timor" "(Persatuan Sosial Demokrat Timor/ ASDT) yang didirikan pada tanggal 20 Mei 1974, kemudian partai ini berganti nama menjadi Fretilin, dengan tokoh-tokohnya: Ramos Horta, Fransisco Xavier do Amaral, dan Nicolau Lobato. Ketua partai dipegang oleh Fransisco Xavier do Amaral, seorang pegawai bea cukai di Dili, sedangkan Ramos Horta dipercaya sebagai sekretaris urusan luar negeri (Neonbasu, 1997: 45).

Partai Sosial Demokrat yang sebelumnya bersifat demokratis dan moderat, kemudian berubah nama menjadi Fretilin yang bersifat revolusioner dan condong kepada komunis. Fretilin mempunyai prinsip perjuangan kemerdekaan penuh bagi Timor Timur, tanpa bergantung pada salah satu negara manapun. Fretilin menolak keras prinsip otonomi luas dalam lingkungan negara Portugis yang dicita-citakan partai UDT dan juga menantang keras ide Apodeti untuk berintegrasi dengan Indonesia. Partai ini berkembang dengan pesat karena dukungan para pegawai rendah, penduduk kota, dan mahasiswa yang bersifat radikal untuk menuntut kemerdekaan bagi Timor Timur. Partai Fretilin berhaluan komunis dengan anggota-anggotanya yang menganut ideologi kiri dan beberapa dari mereka adalah aktivis komunis dari Portugal (E.M. Tomodok, 1994: 133). Ramos Horta sebagai ketua dari partai Fretilin berusaha mencari dukungan dengan melakukan kampanye-kampanye, dan tidak hanya di TimorTimur bahkan sampai ke Australia. Di Australia sendiri, partai Fretilin mendapatkan dukungan dari sebuah organisasi yang menamakan dirinya sebagai CIET (Campaign for Independent of East Timor), dan sejak itu Australia menjadi home-base bagi gerakan Fretilin (Soekanto, 1976: 391)

c. Partai Politik APODETI (Associação Popular Democrática Timorese)

Partai politik Apodeti berdiri pada tanggal 27 Mei 1974. Pendirinya adalah Arnaldo dos Reia Araujo, Osorio Soares, dan Guilherme Maria Goncalves. Mereka berpandangan bahwa Timor Timur tidak mungkin menjadi negara merdeka, karena tidak memiliki cendekiawan, teknokrat, kekuatan ekonomi dan sebagainya (E.M. Tomodok, 1994: 94). Aspirasi pokok kelompok ini yaitu memiliki tujuan untuk memerdekakan diri dari Portugal dan bergabung dengan Republik

Indonesiakarena persamaan latar belakang sejarah dan cita-cita. Sebelum Rezim Zalazar di Lisboa, Timor Timur sering mengalami pemberontakan sporadis yang bersifat lokal. Gerakan pemberontakan Viqueque tahun 1959 berhasil menyatukan seluruh masyarakat Timor Timur untuk menentang penjajahan Portugal di satu pihak, dan untuk bergabung dengan Indonesia di lain pihak. Sementara itu dikeluarkan manifesto politik yang merupakan landasan perjuangan partai (E.M. Tomodok, 994: 98), sebagai berikut.

- 1) Integrasi otonom ke dalam Negara Indonesia berdasarkan hukum internasional.
- 2) Pelajaran bahasa Indonesia diwajibkan di sekolah-sekolah menengah serta perlu di buka sekolah-sekolah dasar berbahasa Indonesia, tanpa menghapus sekolah-sekolah Portugis yang ada.
- 3) Hak serta kebebasan esensial manusia.
- 4) Pembagian anggaran yang adil oleh pemerintah.
- 5) Pemberian pekerjaan yang adil dengan menetapkan gaji minimum.
- 6) Hak mogok kaum pekerja sebagai haknya yang salah.
- 7) Bahasadan devaluasi Portugis.
- 8) Pendidikan serta bantuan kesehatan gratis kepada semua lapisan masyarakat.
- 9) Kebebasan beragama dengan penghormatan khusus kepada gereja Katolik yang selalu menjalankan tugas kemansiaannya dan jika mungkin dibantu karena doktrinnya mengkonsolidasi politik sosialTimor.
- 10) Kebebasan berpikir serta mengeluarkan pendapat yang bertanggung jawab.
- 11) Pemilihan dengan pemberian suara langsung, sesuai prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam peraturan.
- 12) Apodeti menentang secara terbuka:
 - a. Praktek-praktek tidak berperikemanusiaan serta anti sosial pejabat-pejabat pemerintah dalam mengumpulkan kum pekerja.
 - b. Diskriminasi rasial.
 - c. Korupsi serta semua tindakan kolonialis.

d. Partai Politik KOTA(Klibur Oan Timor Aswaⁱⁿ)

Partai ini pada awalnya bernama APMT (Associacao Popular Monarquica Timorese) yang berdiri pada tanggal 8 November 1974, dan dipimpin oleh Thomas Ximenes. Partai ini kemudian berubah nama menjadi Partai Anak-Anak Pejuang dari Gunung (Klibur Oan Timor Aswain = KOTA), yang dipimpin Jose Martins sebagai ketua. Partai ini merupakan partai kecil, tidak seperti partai-partai sebelumnya (Neonbasu, 1997: 45). Partai KOTA bersikap terbuka bagi ketiga parpol terdahulunya, artinya para pendukung partai tersebut mengikuti salah satu partai pendahulunya. Jose Martins merupakan penggerak dalam partainya, karena dia seorang aktivis dan banyak mengetahui latar belakang dan asal usul para pemimpin UDT dan Fretilin. Partai KOTA memiliki keyakinan bahwa maasa depan Timor Timur, bukanlah mandiri sebagai negara merdeka, tetapi bergabung dengan Indonesia. Tujuan dari partai KOTA yaitu bergabung dengan wilayah Republik Indonesia, karena para pendiri dari partai KOTA yakin bahwa yang paling tepat adalah integrasi ke Indonesia. Hal itu dilihat dari keadaan sosial, ekonomi rakyat Timor Timur

yang tidak memungkinkan untuk menjadi sebuah negara yang merdeka. Dukungan partai ini dari para karyawan yang berani tampil ke arena politik untuk menyampaikan situasi politik yang tidak menentu pada saat itu (E.M. Tomodok, 1994: 248).

e. Partai Politik Tralabalista

Partai ini didirikan pada tanggal 5 September 1974, dan sebagian besar anggotanya terdiri dari kaum buruh. Partai ini merupakan partai kecil yang terdiri dari para buruh dan mereka mendirikan partai tersebut. Partai Tralabalista yang nantinya bergabung dengan partai-partai besar seperti UDT, Apodeti dan KOTA). Kelima kekuatan politik tersebut pada prinsipnya memperjuangkan tiga (3) alternatif politik yang merupakan pilihannya masing-masing dalam melaksanakan penentuan nasib sendiri, yakni dijelaskan dalam Neonbasu (1997: 46) :

1. Konfederasi/bergabung dengan Portugal (UDT, KOTA, dan Tralabalista).
2. Merdeka penuh, berdiri sendiri tanpa perlindungan (FRETILIN).
3. Integrasi dengan negara Indonesia (APODETI).

Perbedaan pandangan kelima partai politik ini tidak jarang menimbulkan bentrokan antar partai politik, bahkan perbedaan pandangan ini mulai meningkat menjadi konflik bersenjata dan perang saudara di Timor Timur. Perang saudarayang terjadi di Timor Timur telah memberikan situasi yang menjadikan wilayah tersebut sebagai wilayah yang rawan.

3. Proses Integrasi

Dipengaruhi oleh Resolusi PBB No1514/1960 tanggal 14 Desember 1960, Pemerintah Portugis mengubah status negara-negara jajahannya, Pemerintah Portugis mengubah status negara jajahan yang terletak di benua Afrika dan Asia berubah menjadi (Provincia ultramarina), yang terletak di benua Afrika dan Asia.

Politik dekolonisasi dan demokratisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Portugis terhadap daerah jajahannya di Afrika dan Asia, khususnya di Timor Timur, membawa masalah baru. Hal ini membawa sejarah baru bagi rakyat Timor-Leste. Dengan kebijakan-kebijakan tersebut. Kebijakan-kebijakan tersebut membuat rakyat Timor-Leste ingin sekali melepaskan diri dari penjajahan yang telah berlangsung selama lebih dari empat abad.

Rakyat Timor-Leste bercita-cita untuk melepaskan diri dari lebih dari empat abad pemerintahan kolonial. Rakyat Timor-Leste keinginan untuk membebaskan diri dari kekuasaan colonial dan upaya mereka untuk menerapkan politik dekolonisasi. Dekolonisasi, yaitu pembentukan partai-partai politik di Timor-Leste, terkait dengan Resolusi PBB 15.

Kebijakan Pemerintah Portugis tentang dekolonisasi Timor Leste mulaidilaksanakan ketika Kolonel Lemos Portos ditempatkan di Timor Leste. Sejak 25 November 1974, ketika Kolonel Remos Pires menjadi Gubernur Jenderal Timor Timur yang baru. 25 November 1974. Spinoza mengundurkan diri sebagai Presiden Portugal. Dia digantikan oleh Jenderal Da Costa Gomes, yang memiliki latar belakang radikal. Penunjukan Jenderal Da Costa Gomes yang berlatarbelakang radikal juga menjadi factor perubahan kebijakan Indonesia terhadap Timor-Leste. Selanjutnya, Portugal berencana untuk menyerahkan kendali atas Timor Timur kepada Fretilin. Pandangan-pandangan sayap kiri Fretilin kiri dan keikutsertaan Partai Komunis Portugal (PCP) di dalam partai tersebut (Neonbasu, 1997: 44)

Kemunculan partai-partai politik di Timor-Leste merupakan langkah pertama bagi rakyat Timor-Leste untuk mengekspresikan aspirasi mereka. Hal ini dilakukan untuk mengekspresikan penentangan mereka terhadap kebijakan-kebijakan Portugis. Partai-partai politik seperti Fretilin,

UDT dan Apodeti berjuang untuk mendapatkan jalan mereka dalam menentukan masa depan Timor-Leste sesuai dengan tujuan dan keinginan partai. Menentukan masa depan Timor-Leste.

Partai Fretilin dan UDT membentuk koalisi pada tanggal 20 Januari 1975 untuk membentuk dan bekerja sama, dengan harapan bahwa mereka dapat memenangkan mayoritas suara dan mengalahkan Partai Apodeti. Koalisi ini dibentuk Untuk mengalahkan Partai Apodeti, kedua partai ini membentuk koalisi pada 20 Januari 1975. Anggota Partai Apodeti digerebek, disiksa, dan dibakar dengan bantuan militer. Penggeledahan, penyiksaan, dan pembakaran rumah-rumah anggota Partai Apodeti semakin meluas. Sementara itu. Mereka yang memiliki kartu keanggotaan partai Apodeti dipaksa untuk mengembalikan kartu keanggotaan partai untuk ditukarkandengan kartu keanggotaan partai Fretilin dan UD . Dalam keadaan seperti ini, partai Apodeti merasa terpojok. Pemerintah Portugis selalu memberikan perlakuan istimewa kepada Fretilin/UDT. Disisi lain, Partai Apodeti terisolasi, tidak mendapat dukungan dari pihak manapun. Dalam keadaan yang sulit. Fretilin/UDT mengambil keuntungan dari situasi ini melalu iprovokasi radio, menuduh Apodeti sebagai pelakunya. Apodeti adalah biang keladi dari semua kerusuhan di TimorLeste.Timor-Leste.

Dikota Dili, terdapat massa Fretilin sayap kiri yang melakukan kericuhan terus menerus. Dalam keadaan seperti ini, Pemerintah gagal untuk mengatasi perasaan takut, tidak aman dan kebencian warga Dili. Pemerintah Portugis mulai menyadari adanya ketidakstabilan diTimorLorosa'e.Mereka mulai merasakan adanya Untuk mengantisipasi kerusuhan yang berkepanjangan, pemerintah Portugal berencana untuk mengadakan pertemuan dengan ketiga partai politik tersebut.Pertemuan dengan partai-partai politik. Pertemuan ini dilaksanakan di Makau untuk membahas dekolonisasi Timor-Leste.Pertemuan tersebut membahas tentang dekolonisasi Timor-Leste. Namun, perwakilan dari Fretilin menolak untuk menghadiri pertemuan tersebut karena mereka tidak ingin hadir bersama Apodeti Hal ini dikarenakan mereka tidak ingin hadir bersama Apodeti yang telah memutuskan untuk bergabung dengan Indonesia. Fretilin melanjutkanperjuangan kemerdekaannya dengan slogan 'Merdeka atau Mati". Sikap Fretilin tidak hanya menunda dekolonisasi, tetapi juga menyebabkan kekacauan di Timor-Leste.

Pada tanggal 11 Agustus 1975, sebuah gerakan yang mirip kudeta terjadi. Pada saat itu. Anggota UDT melucuti senjata polisi dan mengambil alih markas polisi. Mereka melakukan demonstrasi sebagai berikut menuntut pengusiran dan pembasmian komunis dari TimorLorosa'e. Banyakpemimpin Fretilin yang melarikan diri kepegunungan, dan anggota Fretilin yang gagal melarikan diri juga melarikan diri ke pegunungan menjaditawananUDT (HendoSubroto, 1996: 33-34). Kudeta yang dilakukan olehUDT Tujuan utamanya adalah untuk memisahkan Timor Timur dari Fretilin.yang selalu didukung oleh polisi, menguasai lokasi-lokasi strategis dikota dan mulai memobilisasi,menangkap para aktivis Fretilin di Dili. Beberapa orang meelarikan diri ke luar kota.

Sementara itu Paratahanan di Dili diperlakukan dengan baik, sementara di daerah-daerah di luar kota Dili banyak yang terbunuh; kesalahpahaman antara keduapihak, mengakibatkan perang saudara antara Fretilin dan UDT, dan Portugal mengevakuasi orang asing yang berada di Dili. Akibat dari perlawanan UDT terhadap Fretilin, pecahlah perang saudara antara Fretilin dan UDT. Melihat perlawanan UDT terhadap Fretilin, Fretilin mulai melakukan perlawanan. Karena serangan besar-besaran yang dilakukan oleh Fretilin, pasukan UDT meninggalkan wilayah Timor-Leste dan menuju ke perbatasan. Perang saudara antara Fretilin dan UDT mengancam untuk memprovokasi invasi Indonesia ke Timor-Lest Fretilin yang kuat membuat UDT dan Apodeti meminta bantuan medis, makanan, dan obat-obatan dari Indonesia. Tak hanya itu akibat perang saudara ini,Indonesia menerima ratusan pengungsi dari Timor Leste.Para pengungsi tersebut

diterima dari Para pengungsi yang melarikan diri kerumah dinas Konsul Indonesia di Dili, yang menampung ratusan pengungsi dari Timor Leste. Konsul Indonesia di Dili menceritakan kekejaman yang dilakukan oleh pasukan Fretilin yang membunuh, memperkosa dan memenggal kepala mereka, Mereka yang menentang partai Fretilin disiksa, dipukuli, diperkosa dan dipenggal. Indonesia tidak bisa tinggal diam, terutama ketika para pengungsi tiba di perbatasan Indonesia-Timor Leste untuk mencari tempat yang aman (Abdul Syukur, dkk, 2012: 529).

Kepergian perwakilan Pemerintah Portugal di Timor-Leste menunjukkan ketidakmampuan Pemerintah Portugal untuk melindungi keamanannya sendiri, mempertahankan kekuasaan dan otoritas di wilayah jajahannya. Penyelesaian politik di Timor Timur tidak dapat ditangani sendiri oleh Portugis tanpa keterlibatan Pemerintah Portugis. Dengan mundurnya Pemerintah Portugal dari Timor Timur, Indonesia harus menjaga keamanan perbatasan dan stabilitas di kawasan Pasifik, antaralain. Indonesia kemudian mengambil tindakan militer sebagai berikut. Memadamkan baku tembak antara Fretilin, UDT dan Apodeti. Operasi. Operasi Indonesia ini kemudian dikenal sebagai Operasi Komodo (Taylor, 1998: 105).

Dengan kekalahan pasukan gabungan Apodeti, UDT, KOTA dan Tralabhist melawan pasukan Fretilin, mereka sepakat untuk mengajukan petisi kepada Pemerintah Indonesia untuk mengakhiri operasi tersebut. Untuk menghadapi pasukan Fretilin, mereka sepakat untuk mengajukan petisi kepada Pemerintah Indonesia tentang kemungkinan integrasi dengan Indonesia. Petisi yang diajukan pada tanggal 7 Agustus 1975 ini memprovokasi Pemerintah Indonesia. Fretilin marah dan para pemimpin Apodeti dibantai. Relawan bersenjata dari Indonesia datang untuk mendukung pasukan gabungan yang memerangi tentara Fretilin. Mereka bertempur melawan tentara Fretilin. Para sukarelawan ini adalah tentara Indonesia. Sukarelawan Indonesia, Apodeti, operasi militer pasukan Apodeti, Operasi militer UDT, KOTA dan pasukan Tralabhist bergabung untuk melawan Fretilin yang berpusat di daerah perbatasan Timor Barat sebagai upaya untuk melemahkan kekuatan Fretilin. Timor Barat berusaha melemahkan kendali Fretilin atas negara. Pasukan sukarelawan Indonesia dikoordinasikan oleh intelijen Indonesia dan melibatkan pasukan ABRI yang berpakaian seragam militer terbalik (Abdul Syukur, 2012) Posisi tersebut semakin memans Pada tanggal 24 November 1975, Fretilin meminta bantuan PBB untuk menarik pasukannya ke Indonesia. Kemudian, pada tanggal 28 November 1975, Fretilin mendeklarasikan kemerdekaan sepihak di Dili. Deklarasi tersebut memproklamirkan berdirinya sebuah negara merdeka yang diberi nama 'Republik Demokratik' Timor-Leste'. Selanjutnya, Setelah deklarasi dibacakan, bendera Portugis diturunkan dan diganti dengan bendera Republik Demokratik Timor-Leste dan mengangkat pemimpin Fretilin Francisco Xavier do Amaral sebagai Presiden Timor-Leste. Pada kesempatan itu, Xavier do Amaral menyatakan proklamasinya sebagai berikut:

Dia menyatakan sebagai berikut.

Dalam upaya mengekspresikan aspirasi tertinggi rakyat Timor Timur dan demi menyelamatkan kepentingan paling sah tentang kedaulatan nasional, Komite Sentral Fretilin menyatakan proklamasi secara unilateral, kemerdekaan Timor Timur terhitung sejak pukul 00.00 hari ini. Dan dengan ini menyatakan berdirinya Negara Republik Demokratik Timor Timur, anti-kolonial, anti-imperial (Abdul Syukur, 2012: 530).

Deklarasi kemerdekaan sepihak dari Fretilin untuk Timor-Leste tidak diakui oleh negara-negara barat, seperti Amerika Serikat dan Australia tidak mengakui Timor-Leste, antara lain Amerika Serikat, melalui Menteri Luar Negeri Henry Kissinger Pemerintah Amerika Serikat mengumumkan bahwa mereka tidak akan mengakui kemerdekaan Timor Leste seperti yang

dideklarasikan oleh Fretilin. Lebih lanjut, (Soekanto, 1976: 426) menjelaskan bahwa Australia, melalui Menteri Luar Negeri Andrew Peacock, menjelaskan dalam sebuah wawancara pada 16 Desember 1975 bahwa mereka tidak mendukung politik luar negeri Indonesia. Dalam wawancara pada tanggal 16 Desember 1975, Australia menjelaskan bahwa mereka tidak mendukung Fretilin, di mana dia menjelaskan bahwa Australia tidak akan pernah mengakui deklarasi kemerdekaan sepihak dari Fretilin untuk Timor Timur. Sementara itu, Indonesia juga tidak mau mengakui deklarasi kemerdekaan sepihak Fretilin untuk Timor Timur. Kegagalan Fretilin untuk mengakui kemerdekaan Timor Timur dilihat oleh Pemerintah Indonesia sebagai tanda dukungan negara-negara tersebut terhadap integrasi Timor Timur.

Negara-negara ini mendukung integrasi Timor Timur dengan Indonesia. Dua hari kemudian, sebagai tanggapan atas deklarasi kemerdekaan Fretilin, kemudian koalisi partai UDT, Apodeti, KOTA, dan Tralabista mengumumkan deklarasi integrasi dengan Indonesia. Pada tanggal 30 November 1975, deklarasi persatuan dengan Indonesia diumumkan di Balibo. November 1975, Deklarasi ini mewakili rakyat Timor-Leste. Deklarasi ini merupakan pernyataan atas nama rakyat Timor-Leste untuk mengintegrasikan Timor-Leste dengan Indonesia. Timor Timur diintegrasikan ke dalam Indonesia sebagai provinsi ke-27. Deklarasi keempat organisasi politik tersebut ditulis dalam bahasa Inggris dan Portugis,

Deklarasi Balibo digunakan sebagai dasar bagi kaum anti-Fretinis untuk melawan deklarasi kemerdekaan sepihak dari Fretilin untuk Timor Timur. Berdasarkan permintaan ini, Pemerintah Indonesia memperkuat pasukannya di daerah perbatasan. Mereka mendarat di Dili pada tanggal 7 Desember 1975. Pendaratan di Dili. Selama operasi ini, Indonesia melancarkan serangan militer terhadap Dili. Untuk operasi ini hampir 10.000 tentara ikut serta. Dalam operasi ini, pasukan Kopassus mendarat di Dili bersam dengan pasukan dari Divisi Brawijaya dan Siritwangi. Pendaratan dipimpin oleh Jenderal L.B. Moerdani dan Brigadir Jenderal Dadin Kalbuadi. Selama pertempuran di Dili. Selama pertempuran di Dili, seorang wartawan Australia, Roger Ernst, terbunuh (Hendro Subroto, 1996:116).

Pada tanggal 18 Desember 1975, Pemerintah Sementara Timor-Leste (PSTT) mengirim telegram kepada Presiden Suharto. Telegram isi telegram tersebut adalah permintaan bantuan militer, sosial, dan ekonomi dari Indonesia Hal ini untuk memastikan keamanan dan ketertiban di wilayah Timor Timur dipulihkan tanpa gangguan. Tujuannya adalah untuk membebaskan Timor Timur dari gangguan dan ancaman. Pada tanggal 31 Mei 1976, Indonesia berusaha untuk melegitimasi pendudukan Timor Timur. Indonesia membentuk Majelis Rakyat Timor Timur. Yang pertama dibentuk pada tahun 1976. Parlemen ini bertugas untuk mengajukan petisi kepada Presiden Suharto yang menyerukan integrasi Timor Timur ke Indonesia. Petisi tersebut ditandatangani oleh Ketua PSTT Arnaldo de Araújo dan Guilherme Goncalves. Presiden PSTT Arnaldo de Araújo dan Perwakilan Regional Timor-Leste Guilherme Goncalves menandatangani petisi tersebut.

Isi utama dari petisi singkat ini adalah integrasi Timor Timur tanpa syarat dengan Republik Indonesia. Timor Timur akan diintegrasikan dengan Republik Indonesia tanpa jajak pendapat. Selanjutnya Arnaldo de Alajuo dan Presiden Parlemen Timor-Leste menandatangani petisi tersebut, yang ditandatangani pada tanggal 7 April 1976. Timor-Leste kemudian terbang ke Jakarta pada tanggal 7 Juni 1976 dan menyerahkan petisi tersebut kepada Presiden Soeharto. 29 Juni 1976, Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin oleh Presiden Suharto pada tanggal 29 Juni 1976 memutuskan untuk menanggapi secara positif keinginan rakyat Timor Timur dengan segera melaksanakan proses integrasi wilayah Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Pada tanggal 1 Juli 1976, rancangan undang-undang tentang penggabungan Timor Timur kedalam Indonesia diajukan ke DPR. Rancangan undang-undang tersebut disahkan sebagai Undang-Undang tentang Aneksasi Timor Timur ke Republik Indonesia. Undang-undang ini disahkan sebagai "Undang-Undang Penggabungan Timor Timur ke dalam Republik Indonesia" (Tingkat I Timor Timur). Kemudian, pada tanggal 17 Juli 1976, Presiden Suharto menandatangani Undang-Undang No. 7 Tahun 1976, yang menetapkan penggabungan Timor Timur ke dalam Indonesia.

UU No.7 tahun 1976 menyatakan bahwa Timor Timur adalah bagian dari Indonesia dan secara resmi menetapkan wilayah tersebut sebagai bagian dari Republik Indonesia. Timor Timur secara resmi ditetapkan sebagai provinsi ke-27 Republik Indonesia. Sejak integrasi dengan Indonesia, Timor Timur telah dibagi menjadi 13 distrik, 61 kecamatan, dan 61 sub-kabupaten, kabupaten, 61 kecamatan dan 1.739 desa. Perkembangan pembangunan Timor Timur terus direalisasikan oleh Indonesia.

Seperti yang terlihat pada periode 17 Juli 1976 hingga 31 Maret 1977, Pemerintah Indonesia menginvestasikan dana untuk pembangunan perumahan, rumah sakit, dan desa-desa. Antara 17 Juli 1976 hingga 31 Maret 1977, Pemerintah Indonesia menginvestasikan dana untuk pembangunan perumahan, rumah sakit, dan gedung-gedung sekolah, serta pembangunan air minum dan rumah sakit. Pada tahun 1977, Pemerintah Indonesia menginvestasikan dana untuk pembangunan rumah, rumah sakit, dan gedung sekolah, serta untuk pembangunan air minum dan rumah sakit, serta menginvestasikan dana untuk pembangunan rumah sakit. Sementara itu, antara tahun 1977 dan 1978, pemerintah pusat R6,6 miliar untuk pertanian, kehutanan, koperasi, dan pembangunan desa, R6,6 milyar dibelanjakan untuk kehutanan, koperasi, pembangunan desa dan pembangunan sektor kesehatan, sedangkan pada tahun 1976-1980

Dilihat dari total pengeluaran anggaran selama periode 1976-1980, dana yang dikucurkan oleh Indonesia untuk Negara Timor Timur untuk proyek-proyek pembangunan dibawah Keputusan Presiden senilai Rp99,913 juta untuk proyek-proyek pembangunan dibawah Dekrit Presiden, Rp113,999 juta untuk proyek-proyek sektoral dan Rp 64,999 juta untuk proyek-proyek sektor kesehatan. Rp100 juta dialokasikan untuk proyek-proyek sektoral dan Rp64.705 juta untuk pengeluaran rutin. Anggaran harian. Anggaran ini melebihi anggaran rutin untuk Nusa Tenggara Timur, bahkan melebihi Jawa Tengah (Abdul Syukur, dkk, 2012: 537).

Dilihat dari kegiatan pembangunan di berbagai sector yang dilakukan oleh Nusa Tenggara Timur, dapat disimpulkan bahwa Dilihat dari kegiatan pembangunan di berbagai sektor yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, dapat dilihat bahwa pemerintah Indonesia telah melaksanakan sejumlah kegiatan pembangunan untuk membuat provinsi termuda di Indonesia saat itu dapat bersaing dengan provinsi lainnya. Menjadikan provinsi termuda di Indonesia yang kompetitif dengan provinsi lainnya.

4. Latar Belakang Lepasnya Timor Timur dari Negara Kesatuan Republik Indonesia

Ketetapan Provinsi Timor Timur sebagai bagian dari Republik Indonesia tanggal 1 Januari 1989 menunjukkan bahwa integrasi sudah menjadi keputusan pemerintah Indonesia. Integrasi tersebut tidak dapat dibatalkan dan masyarakat Timor Timur harus menerimanya kenyataannya, sehingga akhirnya dunia internasional pun mengikuti jejak integrasi ini dan mengakuinya. Munculnya berbagai gerakan perlawanan terhadap integrasi Timor Timur, runtuhnya sistem orde baru dan adanya campur tangan asing dalam permasalahan tersebut Timor Timur mempengaruhi posisi negaranya.

Akan tetapi pihak yang Kontra terhadap keputusan pengintegrasian Timor Timur ke Indonesia masih berkelanjutan. Mereka berkeinginan mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri terdapat berbagai perlawanan yang didukung oleh kalangan gereja. Militer Indonesia melanjutkan operasi militer karena masih terdapat sisa-sisa gerakan Fretilin di daerah pedalaman dan pegunungan di Dili. Pada bulan September 1977, operasi berikutnya dilakukan secara ekstensif melibatkan 15.000 tentara tambahan, Selain itu, operasi ini didukung dengan penggunaan pesawat pengebom infanteri Pesawat Darat Bronco OV-10 AS dan pengembara Australia.

Operasi militer ini berlanjut hingga tahun 1978 dan dalam operasi militer ini Pada tanggal 31 Desember 1978, pemimpin Fretilin yaitu Nicolau Lobato disergap ABRI. Operasi militer Indonesia ini terus berlanjut kemudian dipaksa oleh warga yang bergabung dengan Fretilin untuk membentuk gerakan gerilya gunung-gunung mulai runtuh. Banyak warga yang menjadi pengikut Fretilin yang tewas akibat pengeboman TNI-AU. Sepeninggal pemimpin utama Fretilin, Lobato digantikan oleh Xanana Gusmao. Sebagai pemimpin gerakan, Gusmao mencoba untuk menyusun kembali dan mengatur kembali Fretilin.

Pergerakan Kemerdekaan Timor Timur pada tahun 1990an Dia fokus pada kampanye kemerdekaannya melalui kampanye diplomatik. Di atas Dekade ini juga menyaksikan tiga peristiwa besar yang mempunyai dampak besar Ada gerakan kemerdekaan di Timor Timur. Ada tiga acara adalah: pembantaian Santa Cruz pada 12 November 1991; penahanan Xanana Gusmao pada November 1992 dan Hadiah Nobel Perdamaian kepada Uskup Belo pada bulan Oktober 1996.

Jatuhnya Soeharto menciptakan keretakan di PBB dan masyarakat. Meningkatkan tekanan pada Indonesia untuk mencapai hal ini penyelesaian masalah Timor Timur. PBB sedang mengatur ulang diskusi di antara mereka Portugal dan Indonesia melakukan hal ini sebelum penyatuan Timor timur ke Indonesia. B.J. Habibie menggantikan Soeharto sebagai Presiden Indonesia Pada tahun 1998, hal ini berdampak besar pada proses kemerdekaan Timor Timur. Presiden Habibie sungguh berbeda dengan Timor Timur, dibandingkan dengan presiden sebelumnya dan kebijakan mereka telah mencapai hal tersebut membuat kagum dunia. Dia mengumumkan bahwa dia menawarkan opsi ini Otonomi penuh bagi rakyat Timor Timur. Pada bulan Januari 1999, Presiden Habibie mengejutkan banyak orang dan mendapat tantangan dari pemerintahannya, khususnya TNI. Habibie mengumumkan bahwa Indonesia akan mengizinkan rakyat Timor Timur untuk memutuskan masa depan mereka sendiri, termasuk kemerdekaan jika diperlukan itu diinginkan dan itu menjadi keinginan mereka. Meskipun Oleh karena itu, pemerintahan Habibie merekomendasikan diadakannya majelis permusyawaratan Rakyat (MPR) membatalkan undang-undang tahun 1976 yang memasukkan Timor Timur dengan Indonesia.

Menyusul perubahan politik yang dramatis di Indonesia dan meningkatnya tekanan internasional, pemerintahan Habibie mengambil keputusan politik yang tegas dengan mengadakan pemungutan suara untuk menentukan masa depan Timor Timur. Rakyat Timor Timur dapat memilih antara dua pilihan: otonomi khusus namun tetap menjadi bagian integral dari Indonesia; atau mandiri. Tanggal 30 Agustus 1999 menandai dimulainya hari bersejarah di Timor Timur. Pada tanggal 4 September 1999, hasil exit poll yang dipublikasikan adalah dan hasilnya 94.388 (21,5%) memilih otonomi khusus dan 344.580 (78,5%) 4.444 memilih kemerdekaan Indonesia.

Setelah hasil pemilu diumumkan, terjadi kerusuhan dan kekerasan di Timor Timur. Tiga tahun kemudian, pada tanggal 20 Mei 2002, Timor Timur memperoleh kemerdekaan dan berganti nama menjadi Republik Demokratik Timor Leste atau dikenal juga sebagai Republik Demokratik

Timor adalah Republik Demokratik Timor Timur. adalah Timor Leste. Timor Leste merupakan negara pertama yang lahir pada abad ke-21.

Kronologi Terlepasnya Timor Timur

19 Desember 1998

John Howard (Perdana Menteri Australia) melayangkan surat kepada Presiden B.J. Habibie yang berisikan usul kepada pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan peninjauan ulang terhadap pelaksanaan hak menentukan nasib sendiri atau *right to self-determination* kepada rakyat Timor Timur.

25 Januari 1999

Diselenggarakannya rapat yang membahas disposisi dari Presiden B.J. Habibie mengenai surat Howard. Presiden Habibie pada disposisinya mengatakan, “Tolong dipelajari, apakah setelah 22 tahun bergabung dengan Indonesia, masyarakat Timor Timur masih merasa belum cukup bersatu dengan kita. Bagaimana kalau kita pisah baik-baik saja melalui Sidang Umum MPR?”.

27 Januari 1999

Sebagai Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Ali Alatas mengumumkan keputusan Sidang Kabinet di Bina Graha, yakni memberikan tawaran untuk memperluas otonomi khusus bagi Timor Timur. Apabila ditolak, pemerintah Indonesia harus rela melepaskan Timor Timur. Keputusan tersebut menyebabkan terjadinya pro dan kontra dalam internal kabinet pada masa itu.

Maret-April 1999

Banyak terjadi peristiwa yang mencekam di Timor Timur, yakni eksodus massal warga pendatang, kekerasan di Gereja Liquica yang membuat mengungsi ratusan orang, sampai kerusuhan besar di Dili yang menelan korban jiwa.

21 April 1999

Terbentuknya kesepakatan damai dari kelompok pro-integrasi dan pro-kemerdekaan yang ditandatangani di tempat tinggal Uskup Belo dan disaksikan Panglima TNI Jenderal Wiranto sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan, Djoko Soegianto sebagai Wakil Ketua Komnas HAM, dan juga beberapa tokoh lainnya.

27 April 1999

Digelarnya pertemuan oleh Presiden Habibie dengan John Howard. Presiden Habibie mendiskusikan secara mendalam tentang Timor Timur dengan John Howard. Habibie memaparkan untuk mengetahui keinginan rakyat Timor Timur bahwa perlu dilaksanakan penentuan pendapat.

5 Mei 1999

Kesepakatan untuk pelaksanaan pendapat rakyat Timor Timur di markas PBB New York ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Indonesia yakni Ali Alatas dan Menteri Luar Negeri Portugas yakni Jamie Gama, beserta dengan Sekjen PBB yakni Kofi Annan. Dua hari setelah itu, hasil kesepakatan tersebut diterima dalam Sidang Umum PBB.

17 Mei 1999

Dikeluarkannya Kepres No.43 Tahun 1999 oleh Presiden Habibie tentang Timor Pengamanan Persetujuan RI-Portugal mengenai Timor Timur, setelah itu dikuatkan juga dengan adanya Inpres No. 5 Tahun 1999 mengenai Langkah Pemantapan Persetujuan RI-Portugal.

1 Juni 1999

Berkibarnya bendera biru PBB di Timor Timur.

2 Juni 1999

Diresmikannya misi PBB di Timor Timur (UNAMET) oleh Ketua Ian Martin, di Dili dengan diwarnai kerusuhan. Tiga hari setelah itu, UNAMET diprotes oleh Wakil Panglima Pejuang Integrasi (PPI) yakni Eurico Gutters.

11 Juni 1999

Dibukanya secara resmi kantor UNAMET di Dili.

16-18 Juni 1999

Diselenggarakannya pertemuan di Jakarta antara kelompok pro-integrasi dan pro-kemerdekaan Timor Timur. Kedua pihak setuju untuk menyerahkan senjatanya kepada UNAMET atau Pemerintah Republik Indonesia.

30 Agustus 1999

Penentuan pendapat rakyat Timor Timur dilaksanakan selepas terjadinya serangkaian konflik. PBB menyampaikan hasilnya yakni 78,5% menolak adanya otonomi dan juga 21% menerima adanya otonomi., sementara itu sisanya dinyatakan tidak sah. Kemudian Timor Timur dipastikan untuk segera lepas dari Wilayah NKRI.

26 Oktober 1999

Diggantikannya Habibie dengan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai Presiden Republik Indonesia serta ditandatanganinya surat keputusan pembentukan UNTAET atau pemerintah transisi di Timor Timur.

30 Oktober 1999

Diturunkannya bendera Merah Putih di Timor Timur pada upacara yang sederhana. Acara ini melarang media untuk meliput, kecuali RTP Portugal.

20 Mei 2002

Timor Timur diresmikan menjadi negara yang merdeka benana Timor Timur.

SIMPULAN

Negara atau kepulauan Timor Timur ini terletak di Timur pulau Timor. Wilayah Timur Timor memiliki Luas sebesar 18.899 km. Timur Timor Letaknya menuju mulai dari Barat Daya hingga ke Timur laut yang sangat luas termasuk posisi wilayah Timor secara keseluruhan. Timor Timur kaya akan sumber daya alamnya, terutama pada bidang pertanian. Terdapat beberapa hasil pertanian yati Koppie, kopra, jagung, kacang hijau, padi. Dan Kekayaan alam yang paling unggul adalah kayu cendana. Dengan keadaan sumber daya alam yang melimpah ini menarik perhatian orang orang Barat untuk menjadikan wilayah Timor Timur sebagai daerah tujuan jajahan dan persinggahan orang orang Barat setelah berdagang di Maluku. Tidak lain tujuan persinggahan orang orang Barat itu adalah untuk mencari rempah - rempah, didukung dengan kekayaannya sumber daya alam di wilayah Timor Timur. Oleh karena itu Belanda dan Portugal (Portugis) menjadikan Timor Timur sebagai daerah jajahannya.

Dalam kasus Timor Timur, dekolonisasi dilakukan oleh Portugis. Kesempatan untuk membentuk partai politik Ini akan menjadi tempat di mana suara masyarakat bisa didengar. Ada lima partai politik di Timor. Timur yaitu UDT (Uniao Demokratik Timor-Leste), Fretilin (Frente Revolutionär des unabhängigen Osttimors), APODETE (Associacao Popular Democratica Timorese), KOTA (Klibur Oan Timor Aswa'in), Tralabalista.

Pada tanggal 18 Desember 1975, Pemerintah Sementara Timor-Leste (PSTT) mengirim telegram kepada Presiden Suharto. Telegram Isi telegram tersebut adalah permintaan bantuan militer, sosial, dan ekonomi dari Indonesia Hal ini untuk memastikan keamanan dan ketertiban di

wilayah Timor Timur dipulihkan tanpa gangguan. Tujuannya adalah untuk membebaskan Timor Timur dari gangguan dan ancaman. Pada tanggal 31 Mei 1976, Indonesia berusaha untuk melegitimasi pendudukan Timor Timur. Indonesia membentuk Majelis Rakyat Timor Timur. Yang pertama dibentuk pada tahun 1976. Parlemen ini bertugas untuk mengajukan petisi kepada Presiden Suharto yang menyerukan integrasi Timor Timur ke Indonesia. Petisi tersebut ditandatangani oleh Ketua PSTT Arnaldo de Araújo dan Guilherme Goncalves. Presiden PSTT Arnaldo de Araújo dan Perwakilan Regional Timor-Leste Guilherme Goncalves menandatangani petisi tersebut.

UU No.7 tahun 1976 menyatakan bahwa Timor Timur adalah bagian dari Indonesia dan secara resmi menetapkan wilayah tersebut sebagai bagian dari Republik Indonesia. Timor Timur secara resmi ditetapkan sebagai provinsi ke-27 Republik Indonesia. Sejak integrasi dengan Indonesia, Timor Timur telah dibagi menjadi 13 distrik, 61 kecamatan, dan 61 sub-kabupaten, kabupaten, 61 kecamatan dan 1.739 desa. Perkembangan pembangunan Timor Timur terus direalisasikan oleh Indonesia.

Selama 23 tahun berintegrasi, konflik antara kedua kelompok pro – integrasi dan anti integrasi (mereka menyebut dirinya pro kemerdekaan), relatif tidak kenal henti. Tindakan kelompok anti integrasi, khususnya gerakan bersenjata, telah menimbulkan gangguan keamanan nasional. Perubahan proses penyelesaian masalah Timor Timur secara signifikan terjadi di era Reformasi, dibawah pemerintahan transisi Presiden Indonesia, B.J. Habibie. Ketika itu, perbedaan mendasar antara Indonesia dan Portugal tentang penyelesaian Timor Timur mulai menemui titik temu, sehingga harapan untuk mencapai penyelesaian yang adil, menyeluruh, dan diterima secara internasional dapat diwujudkan. Presiden Indonesia, B.J. Habibie pada awal juni 1998 mengumumkan Opsi I, berupa kesediaan pemerintah Indonesia memberikan status khusus dengan otonomi luas sebagai formula untuk mencapai penyelesaian politik masalah Timor Timur. Menteri Luar Negeri, Ali Alatas mengumumkan keputusan sidang kabinet paripurna pada tanggal 27 Januari 1999 tentang Opsi II. Ini berarti, jika mayoritas rakyat Timor Timur menolak tawaran otonomi luas, Indonesia akan mengusulkan kepada sidang umum MPR yang baru terpilih agar Timor Timur dapat berpisah dari pangkuan Republik Indonesia secara baik, terhormat, tertib dan konstitusional

Bersamaan dengan penutupan pemungutan suara, dan sebelum pengumuman terjadi kekerasan selama beberapa hari di mulai di Maliana pada tanggal 1 september. Dewan keamanan PBB pada petang hari tanggal 6 September mengirim sebuah misi ke Indonesia guna meneruskan keprihatinan mereka pada pemerintah menyangkut kekerasan pasca jajak pendapat. Keadaan telah berubah drastic sejalan dengan menguatnya arus demokratisasi, keterbukaan, dan reformasi sehingga tawaran DOK Timor Timur menjadi tidak relevan lagi, terlambat, dan cenderung ditolak oleh sebagian rakyat Timor Timur. Selama sekitar tiga tahun diselesaikan bersamaan dengan pernyataan kemerdekaan Timor Leste, pada 20 Mei 2002.

Daftar Pustaka

Buku

- Kuntari, C M Rien, dkk. 2009. Timor Timur: Satu Menit Terakhir Catatan Seorang Wartawan. Bandung: Mizan Pustaka
- Madijah, Lela E. 2002. Timor Timor Perginya si anak Hilang. Jakarta: Antara Pustaka Utama.
- Nevins, Joseph. 2005. A Not-So-Distant Horror: Mass Violence in East Timor. Ithaca: Cornell University Press.

Wiranto. 2002. *Pergulatan Menguak Kebenaran: Selamat Jalan Timor Timur*. Jakarta: Institute for Democracy of Indonesia.

Jurnal

- Cunino, Maria Antonia. 2015. “Referendum dan Kemerdekaan Timor Timur 1999-2002”. Diakses melalui https://repository.usd.ac.id/4197/2/101314014_full.pdf pada 8 Oktober 2023.
- Firmandus, Alberto Ferry. 2015. “Pemerintahan Presiden B.J Habibie (1998-1999): Kebijakan Politik Dalam Negeri”. Diakses melalui https://repository.usd.ac.id/1210/2/101314023_full.pdf pada 8 Oktober 2023.
- Indrawan, Jerry. 2013. “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Konflik di Timor Timur Sebelum Kemerdekaannya dari Indonesia”. Diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/97501-ID-analisis-faktor-faktor-penyebab-terjadi.pdf> pada 8 Oktober 2023.
- Kusuma, Ardli Johan. 2017. “Pengaruh Norma HAM Terhadap Proses Kemerdekaan Timor Timur”. Diakses melalui <https://core.ac.uk/download/pdf/233600865.pdf> pada 8 Oktober 2023.
- Sembiring, Febri, dkk. 2013. “Kebijakan Politik Presiden B.J. Habibie tahun 1998-1999”. Diakses melalui <https://repository.unri.ac.id/bitstream/handle/123456789/4806/Febri%20Manna%20BR%20Sembiring.pdf?sequence=1&isAllowed=y> pada 8 Oktober 2023.
- Tobing, RS Lumban. 2014. “Lepasnya Timor Timur dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”. Diakses melalui <http://digilib.unimed.ac.id/18330/5/7.%20NIM.%203103121069%20CHAPTER%20I.pdf> pada 8 Oktober 2023

Website

- Deutsche Welle Media. 2019. “Memperingati 20 Tahun Referendum Timor Timur”. Diakses melalui <https://www.dw.com/id/memperingati-20-tahun-referendum-timor-timur/a50223772> pada tanggal 8 Oktober 2023.
- Firman, Tony. 2019. “Referendum Timor Leste: Jalan Panjang Kemerdekaan Sebuah Bangsa”. Diakses melalui <https://tirto.id/referendum-timor-leste-jalan-panjang-kemerdekaan-sebuah-bangsa-bFyB> 8 Oktober 2023